

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Indonesia melakukan langkah diplomasi menghadapi konflik Rusia dan Ukraina berlandaskan kepada prinsip politik luar negeri Indonesia yang cinta damai, selain Indonesia bergerak dalam menciptakan perdamaian karena sebagai Presidensi G20 yang diselenggarakan di Bali. Berdasarkan analisis dalam skripsi mengenai Diplomasi Indonesia Menghadapi Konflik Rusia Dan Ukraina Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Kegagalan G7 untuk mencari solusi atas permasalahan ekonomi dunia saat itu berujung pada berdirinya G20. Misi G20 adalah untuk mencapai pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif. Pasca pandemi COVID-19, tahun 2022 menjadi tahun penting bagi pertumbuhan global berbagai negara. Kepresidenan G20 Indonesia menghadapi kesulitan yang lebih besar akibat dari kondisi politik dan ekonomi dunia, seperti konflik antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan posisi politik dunia muram. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional yang menyatakan bahwa “bebas dan aktif” adalah politik luar negeri yang didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia untuk mendukung terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, bukan kebijakan netral. Sebagai salah satu dari 141 negara yang menyetujui resolusi PBB yang menuntut Rusia berhenti menyerang Ukraina, bukan berarti Indonesia berpihak pada Barat, tetapi Indonesia akan terus mendesak agar penggunaan aksi militer dihentikan karena hal itu akan mengakhiri perang. Kepresidenan Indonesia di G20 akan memberikan kesempatan yang sangat baik bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya sebagai pemain regional yang penting bagi masyarakat dunia.

Kedua, Indonesia melakukan diplomasi perdamaian dengan mengunjungi Ukraina terlebih dahulu, Presiden Indonesia dan sekaligus ketua G20 Joko Widodo mengunjungi Ukraina pada tanggal 29 Juni 2022, Presiden Joko Widodo mendesak resolusi damai untuk konflik itu.

Ketiga, Indonesia juga melakukan mediasi ke Rusia pada tanggal 30 Juni 2022. Sebagai presidensi G20 tahun 2022, Indonesia berusaha untuk tetap netral dalam menghadapi invasi Rusia ke Ukraina dan berhati-hati dalam komentarnya. Presiden Joko Widodo mengatakan dia menawarkan dukungan Indonesia dalam upaya perdamaian kepada Presiden Vladimir Putin, sebuah langkah yang dilihat sebagai upaya untuk menyatukan forum G20 yang terpecah oleh konflik yang sedang berlangsung.

Keempat, Indonesia mengangkat isu perang Ukraina dan Rusia di forum G20 untuk mendorong terjadinya perdamaian. Dalam situasi ini, Indonesia tidak mendukung Rusia atau Ukraina. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa negara hanya mendukung upaya untuk mempromosikan perdamaian internasional dan mengakhiri kemanusiaan tragedi, dan tidak memberikan bantuan persenjataan ke Ukraina atau mendukung operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Indonesia telah memilih untuk menghindari perang terbuka dengan negara-negara besar dan menolak untuk mendukung satu pihak sambil memprovokasi pihak lain berdasarkan prinsip dan komitmennya.

## **5.2 Saran-Saran**

Pertama, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan prinsip luar negeri pro perdamaian dunia perlu mengkaji bahwa Indonesia harus lebih percaya diri untuk lebih tegas dalam isu atau konflik di luar wilayahnya sendiri untuk mencerminkan kapasitas diplomasinya. Upaya Indonesia melalui doktrin bebas dan aktif dalam menengahi konflik harus menjadi pedoman bagi negara-negara kekuatan menengah yang memiliki kapasitas serupa untuk mematahkan ketergantungan yang berlebihan terhadap kekuatan besar dalam menyelesaikan

konflik, sehingga studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk menunjukkan bagaimana pendekatan semacam itu dapat berhubungan ke skenario yang berbeda.

Kedua, Indonesia perlu memanfaatkan momentum sebagai pemimpin negara-negara besar seperti presidensi G20 agar memberikan manfaat bagi tercapainya perdamaian dunia. Untuk mensukseskan sebagai tuan rumah G20, Indonesia berperan penting dalam mengatur peserta KTT. Ini akan memberi negara keuntungan diplomatik, kesempatan untuk menengahi perselisihan dan menunjukkan peran global yang lebih besar.

Ketiga, Kementerian Luar Negeri Indonesia perlu pro aktif dalam menangani berbagai isu-isu konflik di dunia sebagai bentuk kepedulian ini merupakan bukti bahwa suatu bangsa adalah bagian tidak terpisahkan dari bangsa lain dalam kanvas internasional dan akan memperkuat posisi dan kemudahan bagi bangsa dalam memenuhi kebutuhan diplomatik.